

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Great Britain atau Inggris Raya merupakan negara kesatuan di Eropa yang terbagi ke empat negara bagian: Skotlandia, Wales, Inggris dan Irlandia Utara, dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan struktur parlementer. Sejak awal keanggotaan Inggris di Uni Eropa cenderung tidak stabil, ditandai penolakan bergabung ke *European Economic Community* (EEC) pada 1957 sebagai pelopor berdirinya Uni Eropa.¹ Argumen penolakan dinyatakan Perdana Menteri Clement Attlee dari Partai Buruh, dengan alasan tidak menerima sistem ekonomi yang diserahkan ke badan supranasional. Setelah itu, Perdana Menteri Konservatif Harold Macmillan merubah perspektif Inggris dan menyetujui Inggris bergabung ke dalam Uni Eropa, mengingat peran Eropa sebagai faktor penting dalam mencapai kebebasan dan kemajauan di dunia. Setelah melewati Presiden Perancis Charles de Gaulle yang memblokir akses Inggris ke Uni Eropa, Inggris akhirnya menjadi anggota Uni Eropa pada 1973.²

Sedangkan Uni Eropa merupakan organisasi regional dengan 28 negara yang kewenangannya diserahkan kepada lembaga supranasional, atau parlemen Uni

¹ The National Archives, "The EEC and Britain's late entry", *The Cabinet Papers*, <https://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpapers/themes/eec-britains-late-entry.htm> (diakses 14 September 2021)

² N. Piers Ludlow. "Dealing with Britain: The Six and the First UK Application to the EEC". (Cambridge, UK: Cambridge University, 1997).

Eropa di atas negara untuk mengatur sejumlah kebijakan bahkan yang dianggap sensitif oleh negara anggota, seperti penerimaan migran dan perdagangan. Sejak awal, Inggris harus menyampingkan sikapnya sebagai negara independen yang terintegrasi secara politik dan ekonomi dalam Uni Eropa. Sebagai negara dengan perekonomian kuat, Inggris merupakan negara penyumbang dana iuran terbesar Uni Eropa namun tidak bersifat timbal balik. Selama menjadi anggota Uni Eropa, persoalan tersebut memicu sentimen nasionalisme Inggris dan lahirnya *Euroskeptics*, atau masyarakat Inggris yang memandang skeptis Uni Eropa dan berkembang menjadi sentimen yang memperkuat keinginan untuk keluar dari Uni Eropa.³ Sehingga pada 1975, Inggris menghadapi kondisi warganya yang menyerukan referendum pertama, dengan hasil 67% warga Inggris memilih tetap menjadi anggota Uni Eropa.⁴

Pada 2016, dunia dikejutkan dengan keputusan Inggris untuk melepaskan diri dari Uni Eropa atau *British Exit* (Brexit) yang sudah berhembus sejak awal masa kepemimpinan Perdana Menteri Konservatif David Cameron pada 2010. Tepat pada 23 Juni 2016, Perdana Menteri Cameron mengeluarkan referendum dengan hasil 52% masyarakat Inggris menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Perubahan sosok Perdana Menteri dengan latar belakang berbeda dari setiap partai juga menghasilkan perspektif dan kebijakan yang kerap berubah. Dalam struktur

³ Muhadi Sugiono, "Brexit, Integrasi Eropa, dan Regionalisme ASEAN" Jurnal Kajian Lemhannas RI, (diakses 25 Februari 2021), <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/134>

⁴ Reuters Staff. "A Long and Winding Road: The UK Journey in and out of the EU." Reuters. Thomson Reuters, January 31, 2020. <https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-timeline-idUSKBN1ZU1UG>.

pemerintahan Inggris, tiga partai politik yang sangat berpengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri adalah Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Liberal Demokrat.

Sebulan setelah referendum dikeluarkan, Perdana Menteri Cameron mengundurkan diri setelah menjabat selama dua periode dan digantikan oleh Theresa May yang juga berasal dari Partai Konservatif. Di periode kedua Perdana Menteri Cameron menjabat, kabinetnya hanya diisi oleh politisi dari Partai Konservatif. Bisa dibilang politisi dari Partai Konservatif adalah pihak yang melatarbelakangi terealisasinya Brexit. Terlepas dari dorongan internal oleh politisi domestik, sentimen nasionalisme yang dipicu kegagalan integrasi di Uni Eropa menyebabkan Inggris kewalahan menghadapi gelombang masuknya imigran pada 2015 yang melebihi target, hingga mencapai 333.000 jiwa. Selain pertentangan kultur antara penduduk Inggris dengan imigran, defisit transaksi berjalan sebesar \$147 miliar juga menjadi faktor yang memantapkan aksi Brexit.

Setelah resmi keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020 berdasarkan Pasal 50 Traktat Lisbon⁵, Inggris mendapatkan masa transisinya selama satu tahun. Oleh karena itu, Inggris dan Uni Eropa sepakat untuk menjaga banyak hal yang sebelumnya dijalankan bersama, dan satu tahun merupakan waktu yang cukup untuk merumuskan hingga menyetujui kebijakan luar negeri baru. Terhitung sejak 1 Januari 2021, kebijakan “*Brexit White Paper*” berupa aturan baru mengenai Inggris dan Uni Eropa akan tetap berjalan sebagai mitra dagang, hingga kerja sama

⁵ Jeffrey D. Sachs, “The Meaning of Brexit”, *Project Syndicate*, June 25 2016, <https://www.project-syndicate.org/commentary/meaning-of-brexit-by-jeffrey-d-sachs-2016-06>

di berbagai sektor yang sebelumnya sudah berjalan. Mengingat bukan menjadi bagian dari Uni Eropa lagi, Inggris bebas untuk menetapkan kebijakan domestik dan luar negerinya sendiri, termasuk merubah prioritas dalam strategi geopolitiknya.

Sebelum Brexit terjadi, kebijakan politik luar negeri Inggris yang dijalankan *Foreign and Commonwealth Office* (FCO) di pusatkan ke Uni Eropa, dengan prioritas kerja sama kepada Amerika Serikat, serta sebagai pelaku utama di panggung Eropa. Dalam konteks sistem internasional yang kerap berubah mendorong Inggris untuk mempertimbangkan kembali kebijakan luar negerinya. Seiring perubahan lingkungan internasional dan kepergian Inggris dari Uni Eropa, pemerintah Inggris yang diwakili oleh FCO merombak strateginya dengan melahirkan “visi untuk Inggris Global”.

“Konsep 'Inggris Global' adalah tekad kami untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini, untuk terus menjadi pemain kebijakan luar negeri global yang sukses. Hal ini dimaksudkan untuk memberi sinyal bahwa Inggris akan terus terbuka, inklusif, dan menghadap ke luar; perdagangan bebas; tegas dalam membela kepentingan dan nilai-nilai Inggris; dan tegas dalam meningkatkan kedudukan dan pengaruh internasional kami.”⁶

Inggris sebagai negara yang bangkit dari perspektif gelap Brexit terus mencari cara untuk meningkatkan pengaruh agar tetap terlibat secara global, salah satunya menggeser fokus ke wilayah Indo-Pasifik. Gagasan Sekretaris Negara Inggris untuk Luar Negeri Jeremy Hunt “*Pivot to Asia*” telah menjadi cahaya untuk mempertahankan keterlibatannya di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, melalui kerja sama yang terjalin pasca fenomena Brexit. Hal ini dikarenakan Asia

⁶ Foreign and Commonwealth Office, ‘Global Britain: delivering on our international ambition’ (13 June 2018): <https://www.gov.uk/government/collections/global-britain-delivering-on-our-international-ambition> [accessed 4 December 2018]

Tenggara sebagai kawasan dinamis yang strategis, dan berpeluang untuk menjadi pusat perekonomian dunia.⁷ Selain itu, wilayah Asia Tenggara menjadi wadah bagi berbagai negara besar dalam mencapai posisi geopolitiknya, begitu juga tujuan Inggris. Dari “Inggris Global” dan gagasan “*Pivot to Asia*” lahirlah “Misi Inggris untuk ASEAN” pada 2019 sebagai salah satu peran Kedutaan Inggris untuk ASEAN.

Wilayah Asia Tenggara, khususnya regionalisme ASEAN memang sudah diincar oleh Inggris untuk menjadi mitra di masa yang akan datang. Bahkan sebelum Brexit terjadi Perdana Menteri Cameron pernah mengunjungi Vietnam dan Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Agustus 2015, serta berdialog rencana kerja sama Inggris-ASEAN yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral ASEAN, Le Luong Minh:

Kunjungan ini mencerminkan komitmen Inggris untuk memperdalam hubungannya dengan ASEAN. Cameron menyatakan bahwa minat Inggris yang besar dalam memperkuat hubungan ekonomi sejalan dengan dorongan kawasan itu menuju integrasi ekonomi yang lebih besar.⁸

Meninjau kembali dari fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada pembaca dalam menelaah kebijakan luar negeri Inggris pasca Brexit yang berorientasi pada cakupan internasional. Penulis juga akan meninjau bagaimana Brexit sebagai

⁷ Jeremy Hunt, “Why I’m looking east for my vision of post-Brexit prosperity,” *The Daily Mail*, December 30th 2018, <https://www.dailymail.co.uk/debate/article-6539165/Why-Im-looking-east-vision-post-Brexit-prosperity-writes-JEREMY-HUNT.html>

⁸ “ASEAN, UK to Deepen Cooperative Relations”, *ASEAN Secretariat News*, July 28 2015, <https://asean.org/asean-uk-to-deepen-cooperative-relations/>

kebijakan luar negeri Inggris memengaruhi “Inggris Global” sebagai strategi geopolitik Inggris pasca Brexit, yang menjadikan Asia Tenggara, khususnya ASEAN sebagai salah satu wilayah prioritasnya.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui lahirnya intensi Inggris untuk mempertahankan kerja sama yang lebih komprehensif dengan ASEAN melalui "Misi Inggris untuk ASEAN" sejak terjadinya fenomena Brexit, penulis melihat bahwa ada kepentingan lain terlepas dari kerja sama yang terjalin. Untuk membatasi topik pembahasan, penulis memiliki dua rumusan masalah sebagai fokus dalam tulisan ini, antara lain;

1. Apa saja implikasi Brexit terhadap Kebijakan Luar Negeri Inggris untuk ASEAN?
2. Mengapa Inggris menekankan fokus ke Asia (*pivot to Asia*), khususnya ASEAN pasca Brexit?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis akan memaparkan implikasi Brexit terhadap Kebijakan Luar Negeri Inggris untuk ASEAN, melalui timbulnya sentiment nasional yang memicu terjadinya Brexit. Selain itu, penulis juga menjelaskan alasan pemerintah Inggris menekankan fokus ke Asia (*pivot to Asia*), khususnya ASEAN pasca Brexit. Perubahan sistem internasional, yaitu absensi Inggris dari organisasi Uni Eropa tentunya berpengaruh ke perumusan kembali kebijakan luar negeri Inggris yang sebelumnya berasas pada rumusan bersama

dengan Uni Eropa. Berbeda dengan kebijakan pemerintah Inggris sebelum Brexit yang cenderung berperan sebagai pelaku utama kerja sama di lingkup Eropa, kebijakan “Inggris Global” mencakup strategi Inggris sebagai aktor independent yang mengarah ke lingkup internasional, melalui pendekatan politik, keamanan, pertahanan, serta ekonomi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah memenuhi tujuan untuk memahami implikasi Brexit terhadap Kebijakan Luar Negeri Inggris untuk ASEAN, serta alasan Inggris fokus terhadap wilayah Asia, khususnya ASEAN pasca Brexit, penelitian ini diharapkan berguna bagi para pembaca. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah kajian dan pemahaman mengenai tujuan Inggris melanjutkan kerja sama dengan ASEAN pasca Brexit. Setelah resmi menjadi mitra dialog ASEAN pada 6 Agustus 2021, Inggris sekiranya dapat memberi kontribusi baik demi perkembangan regionalisme ASEAN. Berbagai potensi yang ditawarkan melalui kerja sama ini dapat menjadi kesempatan masing-masing pihak untuk mencapai kepentingan nasional dan mempertahankan posisi Inggris dalam pemetaan geopolitik dunia saat ini. Terlebih, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menyempurnakan pengetahuan publik mengenai kerja sama internasional, dimana ketertarikan publik masih sedikit karena kerja sama antara Inggris dan ASEAN terbilang baru.

1.5 Sistematika Penulisan

Melalui penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bagian, antara lain:

BAB I : Bagian ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang topik yang telah dipilih, dua rumusan masalah sebagai tumpuan penulisan, serta tujuan dan manfaat penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II : Dalam bagian ini, penulis telah menyusun kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab, yaitu Tinjauan Pustaka sebagai bagian dari penelitian sebelumnya yang akan digunakan penulis, dan penjelasan teoritis dan konseptual yang akan membantu menjawab konstruksi masalah penelitian.

BAB III : Mencakup berbagai metode penelitian yang dilakukan penulis dalam menganalisis topik, seperti pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, bab ini memuat Brexit sebagai kebijakan luar negeri Inggris yang berdampak pada perumusan kebijakan “Inggris Global” yang cenderung ke arah internasional, dengan melibatkan ASEAN sebagai wilayah prioritasnya.

BAB V : Bagian ini merupakan kesimpulan sebagai cakupan inti ataupun interpretasi melalui penelitian yang telah dilakukan, serta saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dari implikasi Brexit terhadap kebijakan luar negeri Inggris untuk ASEAN.